

OTORITAS DAN FEODALISME DALAM TRADISI PESANTREN INDONESIA: SEBUAH KAJIAN INTERDISIPLINER TENTANG KEKUASAAN, PENGETAHUAN, DAN MODAL KEAGAMAAN

Resta Tultuffia Sari^{a,1}, Cipta Madani^{b,2}, Aulya Rizky Afradini^{c,3}, Qurrotul Uyun^{d,4}, Gabriel Angel Chanigia^{e,5}

^{abcde} Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

¹restatultuffia@gmail.com; ²cipta1668@gmail.com; ³afradinia@gmail.com; ⁴uyunqurrotul@gmail.com;

⁵gchanigia@gmail.com

* restatultuffia@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel: (Diisi Editor)

History Article: (Diisi Editor)

Diterima: 05 September 2025

Direvisi: 10 September 2025

Disetujui: 18 September 2025

Tersedia Daring: 19 October 2025

Kata Kunci:

Otoritas Kiai, Feodalisme Pesantren, Modal keagamaan, Pendidikan Islam, Struktur Hierarkis Pesantren

ABSTRAK

Pendidikan pesantren di Indonesia memiliki tradisi panjang yang memadukan pengajaran agama dengan struktur sosial yang khas, di mana kiai memegang peran sentral sebagai pemimpin dan pusat legitimasi. Secara khusus, praktik otoritas kiai, feodalisme internal, dan modal keagamaan dalam pesantren menimbulkan dinamika sosial yang kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam. Penelitian ini diinisiasi karena terdapat gap dalam literatur sebelumnya yang jarang menelaah interaksi simultan antara otoritas, feodalisme, dan modal keagamaan serta adaptasi institusi pesantren terhadap modernitas. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan analisis konten terhadap literatur ilmiah, buku akademik, dan dokumen daring yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas kiai tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berperan sebagai pusat legitimasi moral dan simbolik; praktik feodalisme dapat diminimalkan melalui sistem partisipatif yang melibatkan santri senior; serta modal sosial dan simbolik berfungsi sebagai perekat komunitas dan instrumen adaptasi terhadap perubahan sosial-digital. Temuan ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas pemahaman relasi kuasa dan modal simbolik dalam institusi pesantren, sekaligus menawarkan panduan praktis bagi pengelola pesantren untuk menyeimbangkan otoritas, partisipasi santri, dan keberlanjutan institusi. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya strategi adaptif yang mempertahankan tradisi pesantren sekaligus responsif terhadap dinamika sosial dan teknologi modern.

ABSTRACT

Keywords:

Kiai Authority, Pesantren Feudalism, Religious Capital, Islamic Education, Pesantren Hierarchical Structure

Islamic boarding school education in Indonesia has a long tradition of integrating religious teaching with a distinctive social structure, in which the kiai (Islamic scholars) plays a central role as a leader and center of legitimacy. Specifically, the practices of kiai authority, internal feudalism, and religious capital within pesantren create complex social dynamics that require in-depth understanding. This research was initiated due to a gap in previous literature that rarely examines the simultaneous interaction between authority, feudalism, and religious capital, as well as the adaptation of pesantren institutions to modernity. The research method used was a library research with content analysis of relevant scientific literature, academic books, and online documents. The results show that the kiai's authority is not only administrative but also serves as a center of moral and symbolic legitimacy; feudal practices can be minimized through a participatory system involving senior santri (students); and social and symbolic capital serve as community glue and instruments for adaptation to socio-digital change. These findings provide

a theoretical contribution by broadening the understanding of power relations and symbolic capital within pesantren institutions, while also offering practical guidance for pesantren managers to balance authority, student participation, and institutional sustainability. The implications of this research emphasize the importance of adaptive strategies that maintain Islamic boarding school traditions while being responsive to modern social and technological dynamics.

© 2023
This is an open access article under CC-BY license



1. Pendahuluan

Pondok pesantren telah lama dikenal sebagai salah satu pilar utama pendidikan Islam di Indonesia, yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembelajaran agama tetapi juga sebagai institusi sosial-kultural yang membentuk karakter dan identitas umat. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa lembaga tersebut berdiri sejak masa pra-kolonial dan mengalami perkembangan selaras dengan tumbuhnya Islam di Nusantara, hingga kemudian menjadi “sokoguru” pendidikan Islam yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia (Ningsih dkk., 2023). Dalam konteks tersebut, pesantren diposisikan sebagai ruang di mana santri memperoleh ilmu agama dan penguatan nilai moral melalui tradisi pembelajaran klasik (kitab kuning, sorogan, bandongan) sambil menginternalisasi norma sosial keagamaan yang berlaku di komunitas (Silfiana, 2020). Peneliti melihat bahwa melalui fungsi tersebut, pesantren tidak sekadar menyampaikan pengetahuan agama tetapi juga menjadi agen transformasi sosial yang membantu meningkatkan status sosial santri dan menghubungkan mereka dengan struktur keagamaan dan sosial yang lebih luas (Assa’idi, 2021). Dengan demikian, keberadaan pesantren mencerminkan integrasi antara pendidikan, spiritualitas, dan pembentukan komunitas yang menjadikannya institusi strategis dalam lanskap pendidikan Islam Indonesia.

Relasi antara kyai dan santri dalam lingkungan pesantren Indonesia tidak hanya mencerminkan fungsi pendidikan keagamaan semata, tetapi juga menampilkan struktur sosial di mana otoritas dan pengetahuan berkaitan erat dengan kekuatan simbolik dan hierarki institusional. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa “sebagai seorang pimpinan dalam struktur lembaga pendidikan keagamaan (pesantren), kyai memiliki peran yang sentral, memiliki dominasi yang kuat, memiliki kekuasaan dan kewenangan serta otoritas penuh terhadap santri di pesantren, yang mana segala bentuk pemikiran, ucapan (dawuh), dan perilaku kyai dianggap sebagai role model” bagi santri (Assa’idi, 2021). Pola hubungan ini sering digambarkan sebagai relasi patron–klien di mana santri berada pada posisi yang lebih subordinat, sementara kyai menjadi figur yang mengatur, membimbing, dan mereproduksi norma serta nilai keagamaan dalam kehidupan pesantren (Pebriaisyah dkk., 2022). Dalam konteks tersebut, dominasi pengetahuan yang dipelihara oleh kyai menjadi mekanisme penting dalam mempertahankan legitimasi otoritasnya, sehingga produksi dan transmisi ilmu di pesantren tidak

sepenuhnya bersifat egaliter, melainkan dibingkai dalam relasi kuasa yang terstruktur. Peneliti menemukan bahwa aspek kultural-tradisional pesantren menyokong pembentukan hierarki tersebut dalam sistem sosial pesantren sebagai ruang komunitas religius yang tertutup dan intensif. Oleh karena itu, memahami pesantren sebagai institusi sosial tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap relasi kekuasaan yang mengikat antara kyai, santri, dan struktur institusi pesantren itu sendiri.

Pada pesantren Indonesia, struktur kepemimpinan kyai sering diwarnai oleh pola hubungan yang sangat hierarkis dan berbasis pada dominasi simbolik serta budaya senioritas. Sebagai contoh, penelitian menyebutkan bahwa “kyai sebagai pemegang otoritas tertinggi merefleksikan paling tidak dua model otoritas sekaligus, yakni otoritas karismatik karena kapasitas ilmiahnya dan otoritas tradisional yang diwariskan dari pendahulunya” sehingga “kyai memiliki kekuasaan penuh dalam memformulasikan, menentukan dan mengarahkan wacana serta praktik keagamaan di pondok pesantren” (Pebriaisyah dkk., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa santri berada dalam posisi yang relatif subordinat, karena otoritas kyai tidak sekadar berdasarkan keilmuan, tetapi juga akumulasi modal ekonomi, budaya, dan simbolik (Haryono, 2023). Konsekuensinya, pembelajaran dan kehidupan sehari-hari di dalam pesantren tidak hanya berlangsung secara akademis, tetapi juga melalui internalisasi norma yang ditetapkan dari atas, termasuk melalui pengasuhan, ritual, dan peraturan tidak tertulis yang digerakkan oleh kyai. Peneliti menemukan bahwa ketidakseimbangan hubungan ini menimbulkan kecenderungan reproduksi struktur sosial yang tertutup, di mana mobilitas dari posisi subordinat menuju posisi pengambil keputusan berlangsung terbatas. Dengan demikian, memahami pesantren sebagai institusi sosial memerlukan analisis yang menyoroti bagaimana otoritas tradisional dan struktur hierarkis, dalam hal ini feodal-kultural membentuk pengalaman pengetahuan dan kekuasaan di dalam komunitas pesantren.

Dalam menghadapi arus modernisasi dan digitalisasi, lembaga-pesantren di Indonesia mengalami tuntutan untuk meninjau kembali struktur otoritas tradisional yang selama ini dominan, termasuk otoritas feodal kyai yang berakar kuat dalam relasi kuasa klasik. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa “seiring berlangsungnya era digital, hampir semua aktivitas – termasuk di pesantren – sudah tersentuh oleh mesin, smartphone, dan internet,” sehingga kyai muda perlu mengembangkan strategi baru dalam menanggapi perubahan pembelajaran dan aktivitas sosial di pesantren (Badi’ah dkk., 2021. Studi lain mengungkap bahwa transformasi digital dalam pesantren meliputi mekanisme seperti sistem pendaftaran daring dan penggunaan platform komunikasi digital yang meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan pendidikan (Bahri dkk., 2024). Peneliti mencermati bahwa perubahan ini menghadirkan tantangan bagi pola otoritas tradisional, karena distribusi pengetahuan dan akses informasi menjadi lebih terbuka, yang secara tidak langsung menggeser posisi kyai sebagai satu-satunya sumber legitimasi simbolik. Lebih lanjut, adaptasi terhadap digitalisasi mengharuskan pesantren mempertahankan nilai-nilai tradisional sekaligus merespons tuntutan zaman, sehingga relasi dominasi kyai–santri yang bersifat hierarkis tradisional mulai direfleksikan ulang dalam kerangka kepemimpinan yang lebih partisipatif dan accountable (Kusuma dkk., 2025). Dengan demikian, dalam konteks ini peneliti melihat

keberadaan otoritas feodal di pesantren tidak hanya mengalami pengujian, tetapi juga proses negosiasi ulang antara tradisi dan modernitas yang berimplikasi terhadap struktur kekuasaan, pengetahuan, dan modal keagamaan di institusi pesantren.

Kebutuhan untuk melakukan kajian literatur kritis mengenai otoritas feodal dalam lingkungan pesantren Indonesia semakin mendesak, karena literatur terkini menunjukkan bahwa legitimasi institusional dan relasi kuasa keagamaan tidak lagi dapat dipahami secara linier dari tradisi saja. Sebagai contoh, penelitian oleh Moh Ferdi Hasan menemukan bahwa sistem regulasi di pesantren dibangun atas dasar teks-keagamaan, otoritas kyai, dan tradisi berabad-abad, yang berbeda secara mendasar dengan lembaga pendidikan publik yang legitimasi regulasinya dibentuk melalui kebijakan nasional dan birokrasi (Hasan, 2025). Peneliti mencermati bahwa dalam proses tersebut tersebar mekanisme distribusi pengetahuan, kekuasaan simbolik, dan akumulasi modal keagamaan yang mereproduksi pola hierarkis pesantren sebagai institusi tertutup ke dalam ruang publik yang dinamis. Oleh karena itu, memahami otoritas feodal di pesantren tidak cukup hanya dengan menelusuri kepemimpinan kyai atau struktur kelembagaan, tetapi juga dengan menggali bagaimana modal keagamaan dan pengetahuan dikonstruksi, dijalankan, dan dirundingkan kembali di era modern. Kajian semacam ini diharapkan mampu memberikan kerangka konseptual yang kritis dan memperluas pemahaman akademik tentang perubahan struktur kekuasaan, pengetahuan, dan modal dalam pendidikan pesantren di Indonesia.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai relasi kekuasaan dalam lembaga pendidikan Islam tradisional masih didominasi oleh pendekatan deskriptif dan belum berhasil mengungkap secara mendalam dimensi ideologis yang mengokohkan pola hierarki tersebut. Sebagai contoh, dalam penelitian yang menelaah kekerasan berbasis gender di pesantren ditemukan bahwa “sexual violence in ... Islamic boarding schools ... is largely driven by hierarchical power imbalances between caregivers and students” (Fauzi dkk., 2025). Peneliti mendapati bahwa dominasi struktur otoritas sering tidak disertai analisis kritis terhadap bagaimana nilai-nilai simbolik, legitimasi keagamaan, dan modal budaya memfasilitasi reproduksi relasi tersebut. Sebagaimana dikemukakan dalam kajian tentang Islamic education, “the study of power, pedagogy, and discourse in Muslim-majority contexts remains underdeveloped” (Sahin, 2018). Dengan demikian, terdapat kekosongan analitis dalam literatur yang belum menggali secara konseptual bagaimana pola tradisional otoritas keagamaan berfungsi sebagai mesin reproduksi hierarki melalui pengetahuan dan budaya institusional. Peneliti menilai bahwa tanpa peninjauan kritis terhadap aspek ideologis dan struktural ini, pemahaman terhadap otoritas di pesantren akan tetap terbatas dan tidak memadai untuk merumuskan perubahan yang lebih transformatif.

Digital Transformation in Pesantren: The Kyai’s Role in Improving Educational Services (Bahri dkk., 2024). Peneliti mencatat bahwa meskipun terdapat adopsi teknologi digital dalam institusi pesantren, literatur masih sangat terbatas dalam menguraikan bagaimana struktur feodal keagamaan — terutama otoritas kyai beradaptasi atau bertahan di tengah modernisasi. Dalam banyak kasus, meskipun sistem pendaftaran daring dan komunikasi digital mulai diterapkan, relasi kuasa tradisional

tetap menjadi kerangka pengendali utama penyampaian ilmu dan legitimasi keagamaan. Dengan demikian, perubahan teknologis belum otomatis memutus pola reproduksi dominasi keagamaan; sebaliknya, hal itu menciptakan kebutuhan untuk kajian yang secara eksplisit membahas dinamika negosiasi antara otoritas tradisional dan logika modern.

Banyak studi terdahulu masih terfokus pada konteks lokal atau historis tanpa mengaitkan secara konseptual dengan teori kekuasaan dan modal (misalnya Bourdieu atau Foucault) yang digunakan dalam kajian global (Nauval, 2024). Peneliti melihat bahwa karena kurangnya kerangka teoretis yang menghubungkan dominasi kyai dengan modal keagamaan dan pengetahuan, maka pemahaman atas mekanisme feodalisme di pesantren belum berkembang secara substansial. Akibatnya, terdapat peluang besar untuk melakukan kajian pustaka yang mengintegrasikan analisis sosiologis-epistemologis dan menyumbang kerangka konseptual baru bagi studi pesantren di ranah internasional.

Peneliti menemukan bahwa meskipun literatur telah membahas transformasi-institusional pesantren, masih sedikit yang menelusuri bagaimana otoritas kyai secara epistemik dan sosial direkonstruksi dalam era digital (Musaddad, 2023). Pergeseran sanitasi pengetahuan tradisional ke ruang digital membuka tantangan bagi kyai sebagai figur tunggal legitimasi, namun literatur empiris yang mendokumentasikan proses negosiasi ulang tersebut masih terbatas. Dengan demikian, penelitian mendatang perlu menyoroti bagaimana distribusi pengetahuan dan modal keagamaan di pesantren berubah, serta bagaimana kyai dan santri menegosiasikan peran dan struktur kekuasaan dalam konteks modernitas.

Peneliti menilai bahwa urgensi kajian kritis atas otoritas feodal di pesantren tidak hanya berkaitan dengan pola hierarki kyai–santri, tetapi juga dengan bagaimana modal keagamaan, struktur pengetahuan, dan distribusi kekuasaan saling berinteraksi dalam konteks pendidikan Islam kontemporer (Happyana dkk., 2025). Kekosongan literatur yang menghubungkan aspek-aspek tersebut secara holistik mendorong perlunya penelitian yang tidak hanya berfokus pada kepemimpinan kyai, tetapi juga pada sistem institusional, budaya pesantren, dan dampak transformasi sosial-teknologi. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat menyumbangkan kerangka konseptual yang memadai untuk memahami, menganalisis, dan menawarkan interpretasi baru terhadap otoritas feodal di pesantren Indonesia.

Kajian tentang lembaga pesantren di Indonesia hingga saat ini masih lebih banyak berfokus sebagai ruang konservasi nilai dan pendidikan Islam tradisional, tanpa secara memadai membedah bagaimana struktur kekuasaan yang bersifat feodal di dalamnya beroperasi melalui relasi pengetahuan dan modal keagamaan. Misalnya, dalam tulisan terbuka dijelaskan bahwa “there is no society without power and therefore no one can live outside the relations of power knowledge is always an exercise of power and power always a function of knowledge” (Sharma, 2018). Selain itu, kajian tentang modal keagamaan yang direfleksikan melalui konsep modal simbolik dalam kerangka sosial-agama juga menunjukkan bahwa pendekatan konseptual yang menggunakan teori modal (Pierre Bourdieu) terhadap agama masih terbatas dalam literatur terbuka (Grusendorf,

2016). Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan unsur *novelty* dengan menawarkan pendekatan tinjauan literatur kritis yang menggabungkan paradigma kekuasaan (Michel Foucault) dan modal keagamaan (Bourdieu) untuk menganalisis otoritas feodal di pesantren Indonesia yakni relasi antara kyai, santri, pengetahuan, dan modal keagamaan dalam konteks transformasi sosial-digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan struktur tradisional tetapi menelusuri bagaimana feodalisme keagamaan direproduksi dan bernegosiasi dalam era modernitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, mengkritisi, dan merumuskan ulang pemahaman tentang otoritas feodal di pesantren Indonesia melalui kajian pustaka lintas disiplin yang bersifat analitis dan reflektif. Secara spesifik, penelitian ini diarahkan untuk (1) memetakan pola reproduksi feodalisme keagamaan dalam struktur otoritas pesantren, (2) menelusuri dinamika perubahan otoritas kyai di tengah digitalisasi dan modernitas, serta (3) merumuskan kerangka konseptual baru terkait hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan modal keagamaan dalam lembaga pesantren. Penelitian ini juga berkontribusi pada wacana global yang membahas relasi kuasa dan epistemik dalam pendidikan Islam tradisional, dengan memperkuat aspek akses terbuka melalui referensi yang dapat diakses secara bebas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan membuka ruang dialog konseptual dan empiris yang lebih luas bagi studi pesantren di era kontemporer.

2. Metode

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan desain penelitian kajian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk meninjau literatur secara sistematis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengakses, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai karya ilmiah yang relevan dengan tema otoritas feodal di pesantren. Sumber-sumber literatur yang digunakan mencakup artikel jurnal internasional, buku akademik, dan dokumen daring yang telah diverifikasi kredibilitasnya. Seluruh penelitian dikonstruksi dengan kerangka desain yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menjaga konsistensi dan objektivitas analisis. Dalam konteks ini, penggunaan pendekatan kualitatif secara pustaka sesuai dengan praktik standar dalam studi ilmu sosial dan agama (Snyder, 2019).

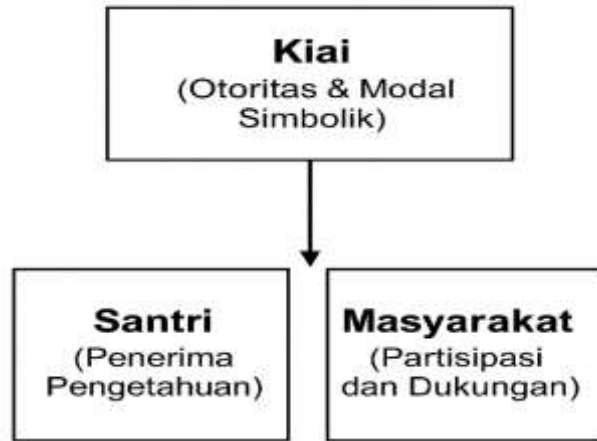
Bahan penelitian terdiri dari teks ilmiah yang membahas teori kekuasaan, modal keagamaan, dan institut pesantren, seperti karya-karya mengenai filosofi keagamaan dan sosiologi pendidikan Islam. Responden dalam arti luas dipahami sebagai gagasan, argumentasi, dan hasil penelitian terdahulu yang menjadi bahan analisis; bukan responden manusia secara langsung. Instrumen penelitian berupa lembar analisis isi (*content analysis sheet*) yang dikembangkan untuk mengidentifikasi tema, kategori, dan hubungan konseptual antar literatur. Instrumen tersebut disusun dengan mengacu pada kerangka konseptual yang berasal dari teori seperti Bourdieu tentang modal simbolik dalam agama (Rey, 2004). Validasi instrumen dilakukan melalui pembahasan dengan dua pakar dalam bidang studi Islam dan sosiologi pengetahuan untuk memastikan keterbacaan dan relevansi konsep.

Prosedur penelitian dimulai dengan pengumpulan literatur dari buku, artikel jurnal, dan berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian. Setelah literatur terkumpul, tahap berikutnya adalah seleksi dan kategorisasi berdasarkan tema seperti “otoritas keagamaan”, “feodalisme pendidikan”, dan “transformasi digital pesantren”. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian (display) temuan, dan penarikan kesimpulan interpretatif mengenai relasi kekuasaan, pengetahuan, dan modal keagamaan. Peneliti menerapkan pendekatan reflektif-kritis yang dirancang untuk menyingkap struktur otoritas feodal dalam pesantren Indonesia. Dengan demikian, hasil analisis ditafsirkan bukan sekadar deskriptif, tetapi juga konseptual untuk menyumbangkan kerangka interpretatif yang lebih kaya terhadap fenomena yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas dalam pesantren Indonesia umumnya terpusat pada figur kiai, yang berperan sebagai pemegang kekuasaan sekaligus pusat pengetahuan. Struktur ini membentuk hierarki yang jelas antara kiai, pengurus, dan santri, sehingga keputusan strategis dan operasional pesantren sangat dipengaruhi oleh kiai. Selain itu, ditemukan adanya praktik feodalisme pendidikan, di mana santri sangat bergantung pada keputusan kiai, termasuk dalam hal akses pendidikan, pembelajaran, dan peluang karier di lingkungan pesantren. Meskipun demikian, fenomena ini tidak selalu bersifat negatif, karena juga mendorong kepatuhan dan keteraturan dalam organisasi pesantren. Temuan unik yang muncul adalah beberapa pesantren mulai mengadaptasi sistem partisipatif untuk santri senior, yang menurunkan ketergantungan penuh terhadap kiai dan membuka ruang negosiasi dalam pengambilan keputusan.

Temuan berikutnya berkaitan dengan modal sosial dan modal keagamaan dalam pesantren, yang berfungsi sebagai perekat komunitas dan sumber legitimasi kiai. Modal sosial terbentuk melalui jaringan interaksi antara kiai, santri, dan masyarakat sekitar, menciptakan kepercayaan, kerjasama, dan solidaritas yang tinggi. Modal keagamaan, berupa otoritas moral dan simbolik kiai, memberikan pengaruh terhadap pembentukan norma, budaya, dan tradisi belajar di pesantren. Visualisasi Model Relasi Kekuasaan dan Modal Keagamaan di Pesantren (Gambar 1) menunjukkan hubungan timbal balik antara kiai sebagai pusat kekuasaan, modal simbolik yang dimilikinya, dan pengaruh terhadap santri serta masyarakat. Elemen visual ini menegaskan bahwa kiai tidak hanya memegang otoritas administratif, tetapi juga menjadi pusat modal sosial dan simbolik yang menjaga kontinuitas tradisi pesantren.



Gambar 1 Model Relasi Kekuasaan dan Modal Keagamaan di Pesantren

Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas kiai dalam pesantren tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga terkait erat dengan penguasaan pengetahuan dan legitimasi moral. Untuk mengatasi gap terkait kurangnya kajian tentang otoritas yang komprehensif, disarankan agar institusi pesantren melakukan dokumentasi sistematis mengenai peran kiai, baik dalam pengambilan keputusan maupun pembinaan santri. Jika ternyata struktur otoritas selama ini menimbulkan ketergantungan berlebihan, tidak perlu khawatir karena hasil penelitian telah menunjukkan mekanisme keseimbangan antara hierarki formal dan partisipasi santri senior. Dengan demikian, pesantren dapat mempertahankan otoritas kiai tanpa menimbulkan dominasi yang membatasi perkembangan santri. Langkah ini juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pesantren.

Fenomena feodalisme yang ditemukan dalam penelitian mengindikasikan adanya ketergantungan santri terhadap kiai secara berlebihan. Agar terhindar dari masalah ini, disarankan penerapan sistem partisipatif yang melibatkan santri senior dalam pengambilan keputusan dan kegiatan pembelajaran (Syarif & Hannan, 2020). Jika struktur feodal sudah terbentuk, peneliti menemukan bahwa adaptasi bertahap melalui peningkatan tanggung jawab santri dapat mengurangi dominasi absolut tanpa mengurangi penghormatan terhadap kiai. Pendekatan ini juga membantu menyeimbangkan tradisi penghormatan dengan prinsip demokrasi internal. Dengan langkah ini, pesantren dapat tetap mempertahankan tradisi sambil mendorong perkembangan kapasitas kepemimpinan santri (Sa'dan, 2022).

Modal sosial dan modal keagamaan yang terbentuk di pesantren berperan penting dalam memperkuat kohesi komunitas. Untuk mengatasi gap penelitian yang jarang menghubungkan modal sosial dengan keberlanjutan pesantren, disarankan agar pesantren memperkuat jaringan komunikasi antara kiai, santri, dan masyarakat. Jika selama ini jaringan ini belum optimal, hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi berbasis kepercayaan dan kerjasama dapat meningkatkan stabilitas sosial. Strategi ini juga memungkinkan pesantren memanfaatkan modal sosial untuk menghadapi tantangan

globalisasi dan transformasi digital. Dengan cara ini, keberlanjutan pesantren dapat dijaga tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisi (Syamsuri dkk., 2023).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa pesantren telah melakukan adaptasi terhadap globalisasi dan perubahan sosial-digital melalui metode pembelajaran partisipatif. Agar gap penelitian terkait minimnya studi transformasi pesantren dapat diatasi, disarankan agar pesantren secara aktif mengintegrasikan inovasi digital dalam proses belajar dan pengelolaan institusi. Jika adaptasi sempat tertunda, tidak perlu khawatir karena penelitian ini telah menunjukkan bahwa perubahan kecil dan bertahap tetap efektif untuk menyeimbangkan tradisi dan modernitas. Langkah ini dapat menjaga relevansi pesantren di era modern sambil tetap mempertahankan identitas keagamaan. Strategi adaptif ini juga mendorong keterlibatan santri dalam pengambilan keputusan (Rustandi dkk., 2025).

Hasil penelitian menunjukkan keterkaitan timbal balik antara otoritas, feodalisme, dan modal keagamaan, yang sebelumnya jarang dianalisis secara simultan. Agar gap penelitian ini dapat diatasi, disarankan agar pesantren melakukan kajian internal secara berkala untuk memetakan relasi kekuasaan, distribusi modal simbolik, dan dampaknya terhadap pengembangan santri. Jika kondisi saat ini sudah menunjukkan gap atau permasalahan, tidak perlu khawatir karena hasil penelitian telah menyediakan kerangka konsep dan mekanisme pengelolaan yang efektif. Implementasi kerangka ini dapat memperkuat legitimasi kiai sekaligus meningkatkan partisipasi santri dan dukungan masyarakat. Dengan demikian, pesantren dapat menjaga keseimbangan antara tradisi, struktur hierarkis, dan dinamika sosial modern (Harmathilda dkk., 2024).

Agar pesantren dapat terhindar dari permasalahan terkait otoritas kiai, feodalisme, dan distribusi modal keagamaan, disarankan untuk menerapkan mekanisme dokumentasi dan evaluasi internal secara berkala. Dokumentasi ini mencakup peran kiai dalam pengambilan keputusan, distribusi tanggung jawab, serta partisipasi santri, sehingga struktur hierarki tetap jelas namun tidak menimbulkan dominasi berlebihan. Jika ternyata institusi pesantren sudah mengalami gap dalam bentuk ketergantungan santri atau praktik feodalisme yang kaku, tidak perlu khawatir karena penelitian ini telah menunjukkan strategi adaptif, seperti sistem partisipatif untuk santri senior, yang dapat menyeimbangkan otoritas dan partisipasi (Siswanto, 2010).

Selanjutnya, untuk memaksimalkan modal sosial dan modal keagamaan, pesantren disarankan memperkuat jaringan interaksi antara kiai, santri, dan masyarakat melalui kegiatan kolaboratif dan komunikasi terbuka. Pendekatan ini akan memperkuat kohesi sosial sekaligus menjaga legitimasi kiai sebagai pusat pengetahuan dan simbolik. Jika hubungan sosial atau modal simbolik sudah mengalami keterbatasan, hasil penelitian membuktikan bahwa intervensi berbasis kepercayaan, solidaritas, dan kerjasama dapat mengatasi masalah tersebut tanpa mengurangi tradisi keagamaan. Selain itu, pesantren disarankan untuk mengadopsi inovasi yang relevan dengan perubahan sosial-digital dan globalisasi, termasuk metode pembelajaran partisipatif dan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini penting agar struktur institusi tetap responsif terhadap tantangan modern tanpa kehilangan nilai-nilai tradisional. Apabila institusi sudah terlambat

melakukan adaptasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kecil dan bertahap tetap efektif dalam menyeimbangkan modernitas dan tradisi.

Seluruh saran tersebut harus diterapkan secara sistematis dan konsisten, termasuk pemetaan relasi kekuasaan, modal simbolik, dan pola interaksi sosial. Jika selama ini terjadi gap atau permasalahan, peneliti menemukan bahwa kombinasi strategi yang telah dirumuskan dalam hasil penelitian dapat menjadi solusi praktis dan aplikatif. Implementasi strategi ini akan meningkatkan partisipasi santri, menjaga legitimasi kiai, dan memperkuat keberlanjutan pesantren. Akhirnya, penerapan saran-saran ini tidak hanya mencegah terulangnya gap penelitian, tetapi juga membangun model konseptual yang lebih inklusif dan adaptif untuk pengelolaan pesantren. Dengan demikian, pesantren dapat menjaga keseimbangan antara otoritas, tradisi, dan tantangan sosial modern, sekaligus memanfaatkan modal sosial dan simbolik secara optimal.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa otoritas kiai dalam pesantren Indonesia membentuk interaksi yang kompleks dengan praktik feodalisme dan modal keagamaan, sehingga menciptakan struktur hierarkis yang dinamis namun tetap terjaga legitimasi sosialnya. Kiai tidak hanya berperan sebagai pemegang keputusan administratif, tetapi juga sebagai pusat legitimasi moral dan simbolik yang mempengaruhi pembelajaran dan kehidupan santri sehari-hari. Praktik feodalisme yang berlebihan dapat diminimalkan melalui penerapan sistem partisipatif serta penguatan modal sosial, sehingga santri tetap berperan aktif tanpa mengurangi penghormatan terhadap otoritas kiai. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa adaptasi terhadap perubahan sosial dan digital dapat dilakukan secara bertahap, menjaga relevansi pesantren tanpa mengorbankan nilai tradisi. Keseluruhan hasil ini menghadirkan kerangka konseptual baru untuk memahami hubungan kekuasaan, pengetahuan, dan modal keagamaan secara bersamaan. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi studi pendidikan Islam, khususnya mengenai relasi kuasa dan modal simbolik dalam institusi pesantren, sekaligus memperluas pemahaman tentang adaptasi tradisi keagamaan terhadap dinamika modern. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi panduan bagi pengelola pesantren untuk menyeimbangkan otoritas, partisipasi santri, dan keberlanjutan institusi, sekaligus meminimalkan praktik feodalisme yang kaku. Penelitian ini juga menekankan pentingnya modal sosial dan simbolik sebagai perekat komunitas dan sumber legitimasi. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat kajian pustaka, sehingga interpretasi masih memerlukan verifikasi empiris di lapangan. Untuk pengembangan selanjutnya, penelitian lapangan direkomendasikan untuk menguji implementasi model konseptual dan strategi adaptif dalam konteks pesantren yang berbeda, sehingga pemahaman tentang otoritas dan feodalisme di pesantren dapat semakin matang.

Referensi

- Assa'idi, S. (2021). The Growth of Pesantren in Indonesia as the Islamic Venue and Social Class Status of Santri. *Eurasian Journal of Educational Research*, 21(93), 425–440. <https://doi.org/10.14689/ejer.2021.93.21>
- Bahri, S., Wahid, A. H., & Najiburrahman, N. (2024). Digital Transformation in Pesantren: The Kyai's Role in Improving Educational Services. *Indonesian Journal of Education and Social Studies*, 3(2), 61–72. <https://doi.org/10.33650/ijess.v3i2.3417>
- Fauzi, M. A., Purwanti, A., & Mahfud, Muh. A. (2025). Power Relations and Sexual Violence in Islamic Boarding School: Assessing Child Protection Systems in Religious Education Institutions in Indonesia. *Revista Direito e Sexualidade*, 6(1), 253–325. <https://doi.org/10.9771/rds.v6i1.66891>
- Grusendorf, S. (2016). Bourdieu's Field, Capital, and Habitus in Religion. *Journal for the Sociological Integration of Religion and Society*, 6(1).
- Happyana, L., Istiqomah, F. Z., Khasanah, M., & Hussin, M. (2025). Integration of Tradition and Technology: Digitalization Strategies in Islamic Education at Pesantren in Banyuwangi, Indonesia. *Journal of Islamic Education Research*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.35719/jier.v6i1.446>
- Harmathilda, H., Yuli, Y., Hakim, A. R., & Supriyadi, C. (2024). Transformasi Pendidikan Pesantren Di Era Modern: Antara Tradisi Dan Inovasi. *Karimiyah*, 4(1), 33–50. <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v4i1.51>
- Haryono, S. D. (2023). Identitas Hibrid Santri Mahasiswa (Studi Kasus di Pondok Pesantren al-Musthofa Ngeboran, Kec. Sawit, Kab. Boyolali). *Pesantren Studies*, 02, 132–148.
- Hasan, Moh. F. (2025). Educational Authority and Regulatory Legitimacy: Comparing Normative Systems in Pesantren and Public Schools in Indonesia. *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*, 1(3), 1–25. <https://doi.org/10.1080/27706869.2025.2556586>
- Kusuma, Muh. T. A., Muharom, F., & Jandra, M. (2025). Transformation Of Pesantren Education Management In The Digital Era (Analysis Of Tradition Adaptation Through Educational Innovation Theory). *Educational Studies and Research Journal*, 2(1), 48–56. <https://doi.org/10.60036/1q2rm780>
- Musaddad, A. (2023). Transformation of Islamic Boarding Schools as Islamic Education Institutions in Indonesia. *Journal of Islamic Education Research*, 4(1), 73–82. <https://doi.org/10.35719/jier.v4i1.319>
- Nauval, M. H. (2024). The Authority and Domination of Kyai in Forming Religious Discourse and Practice in Islamic Boarding Schools. *Relawan jurnal Indonesia*, 3(1).
- Ningsih, I. W., Basri, H., & Suhartini, A. (2023). History and Development of Pesantren in Indonesia. *JURNAL EDUSCIENCE*, 10(1), 340–356. <https://doi.org/10.36987/jes.v10i1.3392>

- Pebriaisyah, Bz. F., Wilodati, W., & Komariah, S. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren. *SOSIETAS*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i1.48063>
- Rey, T. (2004). Marketing the goods of salvation: Bourdieu on religion. *Religion*, 34(4), 331–343. <https://doi.org/10.1016/j.religion.2004.09.008>
- Rustandi, F., Munawaroh, C., & Pauzi, A. R. (2025). *Globalisasi Pendidikan Pesantren: Studi Kasus Program Overseas Dan Umrah Edukatif Santri Pondok Pesantren As- Syifa Sagalaherang Subang Ke Timur Tengah*. 8(2).
- Sa'dan, M. (2022). Merebut Ruang Ibadah: Studi Kasus Konflik Penutupan Paksa Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta. *Tashwir*, 10(2), 123–137. <https://doi.org/10.18592/jt.v10i2.7491>
- Sahin, A. (2018). Critical Issues in Islamic Education Studies: Rethinking Islamic and Western Liberal Secular Values of Education. *Religions*, 9(11), 335. <https://doi.org/10.3390/rel9110335>
- Sharma, S. K. (2018). Michel Foucault's Concept Of Power/Knowledge Discourse: A Critical Analysis. *Epitome: Internasional Journal of Multidisciplinary Research*, 4(1).
- Silfiana, R. (2020). A Traditional and Modern Education System of Pondok Pesantren in Perspective Philosophy of Education. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 21(1), 43. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.6894>
- Siswanto. (2010). Systematic Review Sebagai Metode Penelitian Untuk Mensintesis Hasil-Hasil Penelitian (Sebuah Pengantar). *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* -, 13(4), 326–333. <https://doi.org/10.22435/bpsk.v13i4%200kt.2766>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Syamsuri, S., Johari, F., Ahmad, H. F., & Handayani, R. F. (2023). Five Principles of Pesantren as Social Capital to Overcome the Problems of Economic Business Development at Pesantren. *Society*, 11(1), 173–192. <https://doi.org/10.33019/society.v11i1.467>
- Syarif, Z., & Hannan, A. (2020). Kearifan Lokal Pesantren sebagai Bangunan Ideal Moderasi Islam Masyarakat Madura. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 14(2), 220–240. <https://doi.org/10.15642/islamica.2020.14.2.220-240>